



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANIES RASYID BASWEDAN
2. Jabatan : GUBERNUR
3. NHK : 180169

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 13.347.402.000

1. Tanah Seluas 91 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 633.633.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1655 m2/798 m2 di KAB / KOTA
KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 11.536.815.000
3. Tanah Seluas 2175 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp.
178.350.000
4. Tanah Seluas 483 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH DENGAN
AKTA Rp. 61.824.000
5. Tanah Seluas 116 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 936.780.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 648.000.000

1. MOBIL, MAZDA 2 MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
98.000.000
2. MOBIL, HONDA ODYSSEY MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 450.000.000
3. MOTOR, VESPA VESPA SPRINT Tahun 1968, HIBAH TANPA
AKTA Rp. 50.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI EX250V Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.061.448.595**D. SURAT BERHARGA** Rp. 56.286.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.017.298.105



F. HARTA LAINNYA	Rp.	631.426.947
Sub Total	Rp.	17.761.861.647
III. HUTANG	Rp.	6.846.311.385
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.915.550.262

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.